

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia sedang berusaha untuk memperbaiki kesejahteraan rakyatnya dengan terus melakukan pembangunan dan pengembangan di segala bidang. Salah satu fokus utama pemerintah adalah pada bidang konstruksi, yang sedang mengalami perkembangan pesat di Indonesia. Namun, peningkatan aktivitas konstruksi ini juga membawa risiko tinggi terjadinya kecelakaan kerja di sektor tersebut. Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan upaya untuk mengurangi risiko dan meningkatkan keselamatan kerja di sektor konstruksi.

Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan yang dapat mengakibatkan cedera pada pekerja atau menimbulkan kerusakan harta benda (Permenaker No. 03/MEN/1998). Di Indonesia, angka kecelakaan kerja pada sektor konstruksi masih tergolong tinggi. Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS), pada tahun 2022 terjadi 265.334 kecelakaan kerja pada sektor konstruksi. Oleh karena itu, keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan proyek di industri konstruksi tetap menjadi catatan penting bagi pemerintah. Banyaknya kecelakaan kerja pada industri konstruksi di Indonesia dapat disebabkan oleh dua faktor utama yaitu perilaku tidak aman dan kondisi tidak aman (Ramli, 2010). Kondisi tidak aman adalah kondisi kerja yang tidak memperhatikan aspek keselamatan, kenyamanan dan kesehatan pekerja, seperti ruangan yang terlalu sempit, gelap dan tidak dilengkapi peralatan kebutuhan mendesak. Sementara itu, perilaku tidak aman mencakup kepribadian dan kebiasaan karyawan di lingkungan kerja seperti tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) dan pelanggaran prosedur kerja yang benar.

Terjadinya kecelakaan kerja pada industri konstruksi baik antara tukang bangunan maupun pekerja merupakan hal yang tidak diinginkan karena dapat menimbulkan kerugian pada keduanya.

Pemangku kepentingan di sektor konstruksi mungkin mengalami penurunan produktivitas dan pencapaian tujuan proyek serta kerugian finansial. Sedangkan kerugian yang dialami pekerja dapat berupa luka ringan, luka berat, atau bahkan kematian tragis. Pada dasarnya tanggung jawab perlindungan hak-hak dasar dan kesejahteraan tenaga kerja berada pada penyedia jasa konstruksi (Putri, 2015). Kecelakaan di tempat kerja tidak terjadi secara kebetulan, namun selalu mempunyai penyebab yang jelas. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi penyebabnya agar dapat dilakukan tindakan perbaikan sebagai upaya preventif agar kecelakaan serupa tidak terulang kembali (Suma'mur, 2013). Diperlukan upaya ke depan untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja di sektor konstruksi, dengan tujuan mencapai nihil kecelakaan di lokasi. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Pengelolaan dan pengendalian risiko yang berkaitan dengan aktivitas kerja untuk menciptakan tempat kerja yang aman, efisien dan produktif dikenal dengan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3). (Permenaker No. 5/MEN/1996). Pernerlakuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan bagian dari manajemen yang baik, sangat penting untuk membangun tenaga kerja yang produktif, sehat dan berkualitas, dan merupakan wadah manajemen Kebersihan perusahaan dan kesehatan kerja (hiperkes) terkadang terabaikan (Suardi, 2005). . Namun kenyataannya masih banyak perusahaan yang ragu dalam menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3). karena beberapa alasan seperti kurangnya pemahaman pekerja dan pengusaha tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja (K3), diantaranya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). membutuhkan biaya, perusahaan kurang memprioritaskan kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Saat ini banyak kemajuan dan perkembangan yang terjadi di bidang konstruksi, diantaranya adalah proyek renovasi Gudang Unit 8 dan PT Unit 9. Chemicco

Surabaya. Dengan adanya proyek ini, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai penggunaan alat pelindung diri pada proyek tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) khususnya pada proyek Rehabilitasi Warehouse Unit 8 dan Unit 9 PT. Chemico Surabaya?
2. Faktor apa yang dominan terkait Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek Rehabilitasi Warehouse Unit 8 dan Unit 9 PT. Chemico Surabaya?
3. Solusi apa yang bisa dilakukan terkait Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek Rehabilitasi Warehouse Unit 8 dan Unit 9 PT. Chemico Surabaya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berikut adalah tujuan dari penelitian yang dilakukan :

1. Untuk mengetahui tentang faktor tingkat penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) khususnya pada proyek Rehabilitasi Warehouse Unit 8 dan Unit 9 PT. Chemico Surabaya.
2. Untuk mengetahui faktor yang dominan pengaruh terkait Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek Rehabilitasi Warehouse Unit 8 dan Unit 9 PT. Chemico Surabaya.
3. Untuk mengetahui solusi apa yang bisa dilakukan terkait Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek Rehabilitasi Warehouse Unit 8 dan Unit 9 PT. Chemico Surabaya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh, yaitu:

1. Bagi Perusahaan Jasa Konstruksi Penelitian ini memberikan saran berupa informasi mengenai penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek Rehabilitasi Warehouse Unit 8 dan Unit 9 PT. Chemico Surabaya. Informasi ini dapat digunakan sebagai evaluasi pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menurunkan risiko terjadinya kecelakaan kerja.
2. Bagi Pembaca Penelitian hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi maupun kajian untuk penelitian selanjutnya, memberikan informasi terkait faktor-faktor yang berpengaruh, faktor yang dominan serta solusi yang bisa dilakukan terkait penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) khususnya dibidang konstruksi.

## **1.5 Batasan Penelitian**

Berikut adalah beberapa Batasan masalah terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan:

1. Penelitian berfokus pada proyek Rehabilitasi Warehouse Unit 8 dan Unit 9 PT. Chemico Surabaya.
2. Penelitian membahas tentang pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang terkait dengan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada proyek Rehabilitasi Warehouse Unit 8 dan Unit 9 PT. Chemico Surabaya.